

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial. Dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat demi menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat agar mau bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat kepada besaran-besaran ekonomis semata tetapi sekaligus mencakup besaran-besaran sosial budaya seperti keberhasilan dalam pembentukan nilai, pengembangan kelembagaan, penampungan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Soedjatmoko, et al, 1987 : 46).

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran pemerintah di sini adalah merencanakan dan mengorganisir program

pada tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan pokok, di luar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya (Rukminto, 2001 : 206). Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan program pembangunan tersebut. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis model dari pemerintahan (Azra, 2003 :181). Partisipasi memang selalu ditekankan. Hal ini adalah untuk menyadarkan rakyat agar mereka merasa memiliki program-program pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga hasil-hasil pembangunan tidak hanya akan bermanfaat di masa sekarang saja, tetapi di masa yang akan datang (Darmansyah, 1986 : 222). Karena menurut Wignyosoebroto (2005 :17) Salah satu prinsip partisipasi yaitu mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan.

Partisipasi adalah suatu gejala dimana orang ikut serta dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat kepada kepentingannya dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya (Poerbakawatja, 1988 : 25). Sehingga Partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna

bagi pelaksanaan pembangunan(Kali, Jurnal “Mekttek” Tahun XIII No.3, September 2011).

Menghadapi masa depan bangsa di era globalisasi, demokrasi, dan otonomi daerah kehidupan dan ketahanan masyarakat Indonesia sebagai dasar ketahanan nasional memerlukan perhatian dari seluruh kekuatan bangsa demi mewujudkan tuntutan dari hati nurani seluruh rakyat yang mandiri, tangguh, maju, adil, dan makmur sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekuatan bangsa perlu didukung dengan Lembaga yang dapat menyatukan semangat dalam jiwa kehidupan masyarakat Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Sebagai Lembaga yang berperan penting di dalam peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus tetap dijaga dan ditingkatkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan pembangunan di segala aspek kehidupan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah dan pihak-pihak lain([dpp-lpmjakarta.blogspot.com/p/ad-art.html](http://dpp-lpmjakarta.blogspot.com/p/ad-art.html), diakses Pada 28 Maret 2014, Jam 13.00).

Oleh karena itu sebagai sarana partisipasi masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki diharapkan dapat membantu mempercepat atau mengefektifkan pembangunan di kelurahan dan pembangunan nasional pada umumnya. Hal ini sesuai dengan Visi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yaitu terwujudnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang mendukung program pemerintah, umumnya Pemerintah Provinsi Riau dan khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya kelembagaan bagi pembangunan di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki melalui pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya, pelaksanaan dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Tapi semuanya itu tidak akan ada artinya tanpa partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan, dan dibiayai terutama oleh pemerintah dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan rakyat banyak (Simanjuntak, et al, 1998 : 85).

Namun hal ini tidak untuk pada masyarakat RW 04. Sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang ada di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, masyarakat RW 04 belum memahami apa yang dikatakan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Berdasarkan pengamatan penulis, masyarakat RW 04 lebih memahami Lembaga-lembaga lain yang ada di Kelurahan Tampan Kecamatan Payung

Sekaki, seperti Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK SP) dan Puskesmas. Selain itu masyarakat RW 04 kurang ikut serta dalam setiap program kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung SekakiHal ini dibuktikan dengan melihat kurang ikut sertanya masyarakat RW 04 dalam bekerja sama membangun jembatan simpang jalan mahardika yang sekaligus menjadi akses penghubung antara jalan pemuda dengan jalan siak dan mengikuti senam pagi yang diadakan sekali seminggu.

Berdasarkan realitas yang ada, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki dalam menjalankan program kegiatan, para pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki melakukan hubungan kerja sama dan saling membantu baik bersifat partisipatif dan konsultatif dalam pelaksanaan program pembangunan dengan pemerintahan kelurahan bersama perangkatnya RT, RW dan masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas dan dengan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengadakan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan ini, dengan mengadakan penelitian ilmiah berupa skripsi yang berjudul **：“PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)KELURAHANTAMPAN KECAMATAN PAYUNGSEKAKI (STUDI KASUS DI RW 04)”**.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul bagi penulis memilih judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Penulis melihat bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kelurahan Tampan terutama di lingkungan RW 04 kurang mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauh mana Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).
2. Ditinjau dari segi waktu, biaya, sarana, dan prasarana lainnya penulis merasa mampu melaksanakannya.
3. Sesuai dengan studi yang dilakukan oleh penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

## **C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam bacaan, pemahaman, dan redaksi skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang dipakai. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam *good governace* adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerahnya (Sumarto, 2007:109).

## 2. Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Program adalah Rancangan tentang asas-asas dan usaha yang akan dilaksanakan (Salim, 2009: 1193). Kemudian Kerja adalah Perbuatan melakukan sesuatu (Rizal, 2008 : 91). Sedangkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah dan pihak-pihak lain ([dpp-lpmjakarta.blogspot.com/p/ad-art.html](http://dpp-lpmjakarta.blogspot.com/p/ad-art.html), diakses Pada 28 Maret 2014, Jam 13.00).

Jadi dalam penegasan istilah diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).

### **D. Permasalahan**

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).
- b. Pengambilan Keputusan dalam Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

c. Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

## 2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengintari kajian ini seperti yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, maka penulis memfokuskan pada “Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04)”.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka disusun rumusan masalah yakni, Berapa BesarPartisipasi MasyarakatTerhadap Pelaksanaan Program KerjaLembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04) ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besarPartisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga PemberdayaanMasyarakat(LPM)Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).

### 2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi untuk mendapat gelar Strata Satu(S-1) di UIN SUSKA RIAU, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memberi masukan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki tentang peningkatan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tersebut.

2) Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumbangan pengetahuan dan referensi bagi penelitian yang akan datang.

3) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merumuskan alternatif kebijakan, terutama dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis memuat teori-teori yang akan mempermudah dalam menjawab permasalahan secara teoritis. Dengan Kerangka Teoritis

inilah Konsep Operasional dirumuskan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian di lapangan.

a. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Ndraha, 1990 : 102).

Dalam pelaksanaannya partisipasi itu harus ada usaha untuk menggerakkan orang yang bersangkutan agar mereka berpartisipasi aktif dalam suatu program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian Goldsmith dan Blustain (1980 : 119) di Jamaicaberkesimpulan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika :

- 1) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Partisipasi itu memberikan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- 4) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan (Ndraha, 1990 : 105).

Sehingga menurut Soetrisno (1995:207) mengatakan partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan (Kali, Jurnal "Mektek" Tahun XIII No.3, September 2011).

Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan rasa memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintah, permasyarakatan, dan pembangunan. Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh antusias dan partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Pemberian kesempatan berpartisipasi pada masyarakat, harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberi kesempatan karena mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu hidupnya.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) di dalam Anggaran Dasar Pasal 21 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan merupakan Pelaksana

Organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi kedalam dan keluar, dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggung jawab pada Musyawarah Desa / Kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan merupakan organisasi terendah dalam struktur organisasi sebagai Pelaksana Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Desa / Kelurahan /sebutan lain(*dpplpm-indonesia.blogspot.com. html, akses 16 Februari 2014, Jam 14.30*).

1) Azas, Landasan, dan Tujuan

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) di dalam Anggaran Dasar Pasal 5 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia(*dpplpm-indonesia.blogspot.com. html, akses 16 Februari 2014, Jam 14.30*).

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) di dalam Anggaran Dasar Pasal 6 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berlandaskan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Keputusan-keputusan Musyawarah anggota sebagai landasan operasional (*dpplpm-indonesia.blogspot.com. html, akses 16 Februari 2014, Jam 14.30*).

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) di dalam Anggaran Dasar Pasal 7 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan/sebutan lain bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat Indonesia

*(dpplpm-indonesia.blogspot.com. html, akses 16 Februari 2014, Jam 14.30).*

## 2) Fungsi

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) di dalam Anggaran Dasar Pasal 8 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berfungsi :

- a) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di segala bidang.
- b) Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain sebagai wujud Pembangunan Partisipatif.
- c) Berperan secara aktif dalam membina Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- d) Mengembangkan Program Pemerintah dengan Aspirasi Masyarakat.
- e) Meningkatkan kemampuan Ekonomi Rakyat, baik yang berada dikota maupun di Desa / Kelurahan / sebutan lain yang setingkat, agar dapat menikmati Hasil-Hasil Pembangunan.
- f) Memperkuat potensi masyarakat untuk bergotong-royong dalam Aksi Sosial dan Penanggulangan Bencana*(dpplpm-indonesia.blogspot.com. html, akses 16 Februari 2014, Jam 14.30).*

## 3) Bentuk

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) di dalam Anggaran Dasar Pasal 9 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah Organisasi yang berbentuk Kesatuan, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan / sebutan lain di seluruh Indonesia ([dpplpm-indonesia.blogspot.com](http://dpplpm-indonesia.blogspot.com). html, akses 16 Februari 2014, Jam 14.30).

#### 4) Sifat

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPP LPM) di dalam Anggaran Dasar Pasal 10 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersifat Independen ([dpplpm-indonesia.blogspot.com](http://dpplpm-indonesia.blogspot.com). html, akses 16 Februari 2014, Jam 14.30).

## 2. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan bentuk nyata Kerangka Teoritis. Karena Kerangka Teoritis masih bersifat Abstrak, belum sepenuhnya dapat diukur. Untuk itu dioperasionalkan agar lebih terarah sebagai Acuan Penelitian. selain itu juga untuk menentukan ukuran secara spesifikasi dan teratur agar mudah dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan ini.

Konsep Operasional Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04), dengan indikator yaitu :

- a. Merencanakan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Melaksanakan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.
- c. Mengembangkan dan Melestarikan hasil pembangunan yang dicanangkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru yaitu di RW 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2014 sampai selesai.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah masyarakat RW 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki. Sedangkan objek adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010 : 117). Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2010: 109). Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2010: 112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat RW 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang berusia 17 tahun keatas yakni 2500 jiwa dan tersebar atas 7 RT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan jauh. Walaupun cara seperti ini diperbolehkan, yaitu peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).

- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan (Arikunto, 2010: 183).

Jadi untuk Sampel karena jumlahnya cukup banyak dan mengingat jika diambil keseluruhantidak efektif, maka pengambilan sampel hanya dilakukan pada perwakilan masyarakat setiap RT yang ada pada RW tersebut dengan pertimbangan dianggap lebih mengetahui terhadap permasalahan yang ada. Jadi jumlah RT yang ada di RW 04 ada 7 RT maka setiap RT diambil 8 orang perwakilan yaitu dengan jabatan ketua RT, ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Sehingga seluruhnya berjumlah 56 orang, karena sampelnya kurang dari 100 maka diambil semuanya. Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 orang.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari Observasi ke lingkungan masyarakat RW 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Angket kepada masyarakat RW 04, dan wawancara kepada masyarakat RW 04 dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan Dokumentasi yang relevan guna untuk

melihat Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04)

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Metode Observasi atau Pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan Panca Indera Mata dan dibantu dengan Panca Indera lainnya (Bungin,2001 :142).Observasi dalam penelitian ini yaitu Pengamatan yang dilakukan di sekitar lingkungan RW 04 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki guna untuk menggambarkan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).

### b. Angket

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan bila responden jumlahnya besar dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia (Sugiyono, 2010 :121).Angket dalam penelitian ini yaituPenulis Menyebarkan angket berupa pertanyaan tertutup dengan empat pilihan jawaban kepada responden yaitu MasyarakatRW 04Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki yang masing-masing pilihan jawaban : untuk *option a* diberi nilai 4, b. untuk *option b* diberi nilai 3, untuk *option c* diberi nilai

2, dan untuk *option d* diberi nilai 1 (Arikunto, 2010 : 219). Pertanyaan berkisar tentang kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).

c. Wawancara

Metode Wawancara/Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara Pewawancara dengan Responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Bungin,2001 :133). Wawancara dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan tanya jawab kepada masyarakatRW 04 dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki untuk memperjelas data yang diperoleh dari angket dan mendapatkan data serta informasi yang diperlukan sesuai dengan kerangka penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010 : 274).Dokumentasi dalam penelitianini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film

dokumenter, dan data yang relevan tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04).

#### 6. Teknik Analisa Data

Setelah diperoleh data yang lengkap dan telah dikumpulkan, maka selanjutnya adalah menyusun menjadi sebuah kerangka yang sistematis sehingga menjadi kerangka yang jelas dan mudah untuk dilakukan penelitian. Maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut yang akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data yang kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedangkan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang dipersentasekan selanjutnya diubah dalam bentuk kata-kata, setelah mendapat hasil akhir akan dikualitatifkan kembali. Teknik ini biasanya menggunakan persentase sehingga dikenal dengan Teknik Deskriptif Kualitatif Persentase (Arikunto,2010 :246).

Adapun rumus yang dipakai adalah :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Ket :

P = Angka Persentase.

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu).

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasekan.

100% = Ketetapan rumus (Sudijono,1994 : 40).

Setelah mendapat hasil akhir akan dikualitatifkan dengan kata-kata atau kalimat dengan ketentuan sebagai berikut :

Tinggi = 76% -100%.

Sedang = 56% -75%.

Rendah = 40% -55%.

Sangat Rendah = 0% - 39% atau Kurang dari 40 % (Arikunto, 2010:245-246).

## **H. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui secara keseluruhan terhadap risalah ini maka dapat dilihat sistematika dibawah ini :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN**

Sejarah Berdirinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Hubungan Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pembiayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Tugas dan Fungsi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Susunan

**BAB III : PENYAJIAN DATA**

Bagian ini menyajikan data penelitian baik itu data yang berupa hasil angket maupun data yang merupakan hasil dari wawancara.

**BAB IV : ANALISA DATA**

Bagian ini memaparkan analisa seberapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki (Studi Kasus di RW 04) dengan tiga indikator yaitu Merencanakan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, Melaksanakan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki, dan Mengembangkan serta Melestarikan Hasil Pembangunan yang Dicanangkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran pada instansi terkait(Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2010 : 37).